

Ridwan Syarif selaku Ketua MUI Provinsi Riau yang membidangi komisi Dakwah dan Pendidikan serta Ekonomi Syariah menilai Badan Amil Zakat (BAZ) Riau belum maksimal dalam memberantas kemiskinan.

Pekanbaru, 4/9 (Antara/FINROLL News) - Ridwan Syarif selaku Ketua MUI Provinsi Riau yang membidangi komisi Dakwah dan Pendidikan serta Ekonomi Syariah menilai Badan Amil Zakat (BAZ) Riau belum maksimal dalam memberantas kemiskinan.

Masih terdapatnya gelandangan dan pengemis (gepeng) dan masih adanya kemiskinan di Riau, seharusnya bisa terbantu dengan solusi pengelolaan manajemen zakat yang baik sesuai ajaran Islam.

"Seharusnya pihak pengelolaan Badan Amil Zakat harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi manfaat zakat kepada masyarakat" ungkap Ridwan.

Menurut Ridwan dengan pengelolaan manajemen zakat yang baik oleh sebuah lembaga zakat, dan BAZ jika dikembangkan di sebuah daerah atau negara dapat menyejahterakan umat.

Menurut Ridwan peran BAZ sebagai bentuk memberantas kemiskinan, dan menyejahterakan umat belum begitu kelihatan hingga saat ini di daerah Riau. Sehingga sebagian masyarakat enggan untuk berzakat ke lembaga zakat.

Sementara itu A.Jalaluddin selaku sekretaris BAZ Provinsi Riau sekaligus Kabid Penyelenggara Haji, Zakat dan Wakaf Departemen Agama Riau, mengakui belum optimal dalam memberantas kemiskinan di Riau. Tapi, menurut Jalaluddin, usaha tersebut telah dilaksanakan.

"Walau belum maksimal memberantas kemiskinan, setidaknya dengan usaha yang kami lakukan selama ini telah mengurangi kemiskinan di Riau," ungkap Jalaluddin. Belum optimalnya BAZ dalam memberantas kemiskinan selama ini, menurut Jalaluddin, karena keterbatasan dana dalam sosialisasi. Menurut dia, pihaknya harus ke lapangan menjumpai masyarakat, se Kabupaten dan Kota di Riau. Selain itu, katanya, sejauh ini kesadaran sebagian masyarakat juga masih kurang untuk menyalurkan zakatnya ke BAZ, atau ke lembaga zakat lainnya. "Kadang masyarakat lebih senang membayar zakat langsung kepada yang membutuhkan, padahal zakat yang diberikannya baru sebatas membantu secara konsumtif", jelasnya. Padahal dalam pembagian zakat itu ada dua, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Dalam memberantas kemiskinan model zakat produktiflah yang sebaiknya dikembangkan. Menurut Jalaluddin zakat produktif akan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti memberikan modal usaha, baik berbentuk dana, atau pun berbentuk barang. Bahkan ada lembaga zakat yang membuat sekolah khusus untuk anak kurang mampu, dari dana zakat produktif. Dengan membayar zakat ke lembaga zakat, atau ke BAZ, maka dana zakat akan dikelola untuk membantu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan tahun depan para penerima zakat tersebut sudah bisa membantu keluarganya. Sementara itu untuk model zakat konsumtif, hanya mampu membantu kaum

dua fa dalam waktu sesaat saja. Walau model zakat konsumtif ini juga dilakukan oleh BAZ menjelang Idul Fitri. Pada tahun 2008 lalu Jalaluddin mengatakan pihak BAZ Riau baru mampu mengumpulkan zakat dari masyarakat sebesar Rp1,4 miliar. Tahun ini zakat produktif tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota masing-masing Rp70 juta. Dana tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan Aceh. Menurut Jalaluddin BAZ provinsi Aceh, pernah mengumpulkan zakat sebesar Rp52 miliar dari masyarakatnya. "Hal ini lah yang akan dijadikan contoh bagi kita," kata Jalaluddin. Untuk memotivasi masyarakat akan membazar zakat, pada tahun 2008 lalu Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Perda Zakat nomor 2/Tahun 2008. "Saat ini kami sedang mensosialisasikan Perda Zakat ini, dan diharapkan dengan perda ini akan lebih mengikat dan memotivasi masyarakat untuk turut berperan aktif mengeluarkan zakatnya ke BAZ atau ke lembaga zakat lainnya", jelas Jalaluddin.

PSO - 024

(T